

Tuesday, 08 March 2016

Duga Jalan Hotmix Kilometer 9 Amburadul

DPRD Aru akan Minta Pertanggungjawaban Kontraktor

Dobo - DPRD Kepulauan Aru melalui Komisi III sangat berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara serius dan ketat, terhadap seluruh pekerjaan infrastruktur pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Komitmen itu terlihat, ketika Komisi III DPRD Aru dibawah pimpinan Eko Mantaybobir sebagai ketua didampingi Wakil Ketua, D Lengam dan dua anggota Seri Angker dan Heri Lalaem, Senin (7/3) meninjau proyek pembangunan jalan di kilometer 9 menuju Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang saat ini sudah hotmix.

Proyek jalan yang dikerjakan oleh PT Bumi Karya Perkasa Nasional dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2015 bernilai Rp. 3.841.000.000,- diduga bermasalah. Ketua Komisi III DPRD Aru, Eko Mantaybobir kepada wartawan usai kunjungan tersebut menduga, pekerjaan jalan yang dikerjakan tersebut hanyalah tambal aspal saja, karena itu, pihaknya akan meminta, Direktur PT Bumi Karya Perkasa Nasional bertanggung jawab. Jika kontraktor tidak bisa mempertanggung jawab pekerjaan jalan itu, lanjutnya, maka Komisi III DPRD Aru tidak akan main-main, tetapi akan melanjutkan masalah tersebut ke proses hukum.

“Kita akan memproses hukum Direktur PT. Bumi Karya Perkasa Nasional, bagaimana mungkin pekerjaan hotmiks sepanjang 1.1 Km, dengan anggaran Rp. 3.841.000.000,- ini dikerjakan seperti ini yang tambal sulam,” cetusnya dengan nada kesal. Ia mengkritik habis-habisan pekerjaan yang dinilainya sangat berbau ketidak beresan dimana aspal yang digunakan tidak bertahan lama.

“Pekerjaan seperti apa ini. Ngaur saja ini kontraktor, pekerjaan seperti tambal sulam ini, parkir motor saja standar tatanam, lalu bagaimana kendaraan dengan beban berat melintasi diatasnya,” kesalnya.

Lebih kesal lagi, ketika Komisi III DPRD Aru melihat kondisi jalan hotmix tepatnya di atas gorong-gorong yang sudah rusak parah dan nyaris roboh.

“Ini pekerjaan orang gila, bagaimana mungkin kerjakan hotmiz atas permukaan gorong-gorong yang hampir roboh seperti ini,” tegasnya. Melihat kondisi pekerjaan seperti itu, ia mengancam akan memanggil Direktur PT. Bumi Karya Perkasa Nasional, Salim Pere untuk meminta penjelasan atas pekerjaannya.

“Kita akan panggil lebih dahulu, selanjutnya kita akan memproses hukumnya guna mempertanggungjawabkan pekerjaannya,” ujarnya. **(S-25)**

Saturday, 19 March 2016

DPRD Aru Diminta Awasi Ketat Pembangunan Infrastruktur

Dobo - DPRD Kabupaten Kepulauan Aru diminta, untuk mengawasi ketat pembangunan infrastruktur baik berupa jalan atau jembatan di kabupaten berjulukan Bumi Jargaria ini, sehingga tidak keluar dari mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru, Decky Labok, pengawasan itu perlu, karena ada kontraktor yang kemudian bekerja tidak sesuai bestek.

Kepada *Siwalima* di Dobo, baru-baru ini, Labok menyebutkan, pekerjaan pembangunan jalan Pendopo II menuju Kampung Pisang, Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang diduga bekerja tidak sesuai bestek.

Dikatakan, pekerjaan jalan tersebut tidak menggunakan material tanah putih, tetapi hanyalah material lokal berupa pasir yang diperuntukan pada pekerjaan sirtu

“Kami koordinasi dengan salah satu pengawas lapangan, Ali bahwa, material berupa pasir tersebut hanya digunakan untuk penyerapan air, mengingat hampir sebagian besar lokasi pekerjaan adalah daerah berawa-rawa. Pada tahap pemadatan akan digunakan material berupa tanah putih, yang nantinya didatangkan dari Tual-Maluku Tenggara, “ jelas Labok

Disisi yang lain, lanjutnya, saat dilakukan sirtu pada pekerjaan jalan tersebut, sama sekali tidak menggunakan tanah putih, melainkan langsung disirami aspal sebagai perekat untuk selanjutnya di sirtu.

Menurutnya, pekerjaan jalan tersebut bermasalah, karena tidak sesuai dengan bestek, dimana material yang harus digunakan haruslah putih namun kenyataannya tidak.

“Kalau didalam dokumen pekerjaan diisyaratkan menggunakan material tanah putih, tetapi oleh kontraktor pelaksana kemudian mengabaikannya, maka itu dikategori bermasalah,” ujar Labok.

Menurutnya, persoalan pekerjaan jalan didalam Kota Dobo dan sekitarnya perlu dilakukan pengawasan ekstra oleh seluruh elemen masyarakat, dan lebih khusus para wakil rakyat di DPRD Aru, sehingga tidak terkesan seenaknya dikerjakan diluar persyaratan

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kabupaten Aru, yang juga Kasubag Perencanaan, Hanafi Barut menegaskan, akan meminta kontraktor yang menanggapi pekerjaan tersebut bertanggungjawab.

Kepada wartawan baru-baru ini di Dobo, pembangunan jalan dengan menggunakan dana APBD tahun 2015 bernilai milyar rupiah itu diduga tidak sesuai bestek.

“Kami akan meminta kontraktor bertanggung jawab,” jelas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kabupaten Aru, yang juga Kasubag Perencanaan, Hanafi Barut kepada wartawan baru-baru ini di ruang kerjanya.

Ia mengakui, pekerjaan jalan tersebut harus menggunakan material timbunan beragregat A berupa batu pecah, namun yang terjadi hanya menggunakan material lokal, berupa pasir bercampur tanah yang jauh sekali dari kualitas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

“Ini tidak mungkin, karena mestinya material agregat A tersebut harus digunakan awal, sehingga strukturnya akan semakin kuat, bukannya dibagian atas baru digunakan, selain itu tidak mungkin material lokal yang sudah dipadati ini akan digali kembali dan diganti dengan agregat A,” tandasnya.

Ditegaskan, pihaknya akan membicarakan masalah jalan tersebut dengan kontraktor, akan memberikan penegasan keras agar segera diperhatikan. **(S-25)**